STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. VI, no. 1, 1999

EDITORIAL BOARD:

Harun Nasution
Mastuhu
M. Quraish Shihab
A. Aziz Dahlan
M. Satria Effendi
Nabilah Lubis
M. Yunan Yusuf
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Muslim Nasution
Wahib Mu'thi

EDITOR-IN-CHIEF:

Azyumardi Azra

EDITORS:

Saiful Mujani
Hendro Prasetyo
Johan H. Meuleman
Didin Syafruddin
Ali Munhanif

ASSISTANTS TO THE EDITOR:

Arief Subhan
Oman Fathurrahman
Heni Nuroni

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR:

Donald Potter

ARABIC LANGUAGE ADVISOR:

Nursamad

COVER DESIGNER:

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA *(ISSN 0215-0492) is a journal published quarterly by the Institut Agama Islam Negeri (IAIN, the State Institute for Islamic Studies) Syarif Hidayatullah, Jakarta. (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Department of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. It specializes in Indonesian Islamic studies, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.*

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the views of the authors. The articles contained in this journal have been refereed by the Board of Editors.

© *Copyrights Reserved*

Editorial Office: STUDIA ISLAMIKA, *Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5, PO Box 225, Ciputat 15401, Jakarta, Indonesia. Phone: (62-21) 7423543, 7499272, 7401925, Facs: (62-21) 7423543; E-mail: studia@cbn.net.id Account: 0027793001 Bank Negara Indonesia 1946, Kebayoran Baru/IAIN, Jakarta.*

Subscription rates: Rp 60.000,-, one year, Rp 120.000,-, two years. Order for single copies must be accompanied with payment of Rp 15.000,-. For order outside Indonesia, add $ 8,00 per copy for airmail delivery; all payments should be made by direct transfer to STUDIA ISLAMIKA*'s account, no check or money order can be accepted; for special postal delivery or other special handlings, please contact* STUDIA ISLAMIKA *for correct rate.*

All subscription orders, single copy orders and change-of-address information must be sent in writing to the STUDIA ISLAMIKA Subscription Dept. Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Jl. Kertamukti No. 5, PO Box 225, Ciputat 15401, Jakarta, Indonesia.

Printed in the Republic of Indonesia by INIS.

Hodri Ariev

Al-Tafkîr al-Fiqḥiyah 'inda Nahdlatul Ulama

Abstraksi: *Sejak kelahirannya pada 1926, Nahdlatul Ulama (NU) dikenal sebagai organsisasi sosial-keagamaan yang mendasarkan sikap dan pemikiran keagamannya pada empat mazhab fiqh: Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi. Identitas ini semakin ditonjolkan lagi melalui hasil Muktamar NU yang ketiga pada 1928 di Surabaya, yang mencantumkan maksud pendirian NU dalam AD/ART-nya sebagai organisasi yang memegang teguh salah satu dari mazhab Imam Empat itu. Melalui Muktamar ini pula dibentuk sebuah komisi yang dalam setiap muktamar NU akan membahas persoalan-persoalan fiqhiyah.*

Menelusuri berbagai keberlangsungan dan perubahan dalam tradisi pemikiran fiqh NU, ada dua karakter yang terdapat dalam keputusan-keputusan hukumnya. Pertama, NU cenderung setia—bahkan bisa dikatakan terlalu kaku—dalam mengambil produk pemikiran ulama terdahulu. Oleh sebab itu, di satu sisi NU merupakan lembaga yang mampu menjaga kesinambungan tradisi Islam, tetapi di sisi lain menjadi tidak inovatif atau bahkan stagnan dalam membuat keputusan baru. Hampir semua keputusan hukumnya lebih merupakan pengulangan fatwa ulama-ulama terdahulu, khususnya yang berlatar belakang mazhab Syafi'i. Lebih dari itu, karena dipengaruhi tantangan masa yang berbeda, orientasi ibadah lebih menonjol dibanding nuansa sosial atau politik.

Kedua, meskipun terdapat inovasi, metode dan pendekatan yang dipakai NU dalam memproduksi hukum tetap berasal dari pemikiran ulama terdahulu. Ciri yang terakhir ini bisa dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan forum bahtsul masail sejak awal dekade 80an hingga sekarang ini. Tentu saja banyak faktor yang bisa menjelaskan mengapa karakteristik yang kedua ini muncul. Salah satu yang paling kentara adalah munculnya berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat Muslim seiring dengan keberhasilan pembangunan Orde Baru. Di bidang teknologi, misalnya, para ulama dintuntut untuk menjawab persoalan di sekitar hukum bayi tabung, transplantasi jantung, ginjal dan mata yang diperoleh dari binatang atau euthanasia. Di bidang sosial juga muncul berbagai persoalan yang menuntut jawaban dari fiqh, seperti upah pekerja, pencemaran lingkungan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, peran wanita dan masalah perbankan.

Hingga dekade 1980an wacana keagamaan NU masih didominasi oleh ulama senior yang umumnya merupakan pencinta fiqh dalam pengertian kata itu yang sebenarnya. Ulama-ulama ini sangat disegani karena otoritas keagamannya yang tinggi dan menentukan praktik keagamaan para jama'ahnya. Akibatnya, berbagai usaha inovasi pembahasan masalah hukum yang dilontarkan dalam forum-forum bahtsul masail seringkali gagal karena kewibawaan tokoh-tokoh tua ini.

Dari beberapa faktor yang dijelaskan itu, ada satu fenomena penting yang terjadi pada awal dekade 1980an yang besar sumbangannya terhadap pergeseran pemikiran fiqh itu. Pertama, arus besar dari generasi muda NU untuk secara lebih langsung mengarahkan wacana keagamaan di lingkungan NU. Kedua, Muktamar NU di Situbondo pada Desember 1984, di mana dicanangkan prinsip organisasi yang tidak lagi bersifat politik, tapi lebih mengarahkan pada pengembangan sosial-budaya, atau yang dikenal dengan kembali pada Khittah NU. Momentum inilah yang secara pasti semakin mengarahkan wacana keagamaan NU untuk lebih banyak memberi perhatian masalah-masalah sosial. Dalam semangat ini pula pemikiran Fiqh NU akhirnya bergerser orientasinya, dari yang semata-mata ubudiyah, meluas meresponi masalah-masalah sosial-kemasyarakatan.

Gerakan yang dimotori kalangan muda NU terbilang progresif. Sebagian mereka mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengkaji masalah-masalah kontemporer seperti hak asasi manusia (HAM), gender, demokratisasi, masyarakat madani dan sebagainya. Mereka yang memiliki latarbelakang akademik kuat turut pula mendirikan pusat-pusat studi yang diarahkan untuk membahas persoalan kontemporer, baik isu-isu yang berkembang di tingkat Dunia Islam maupun di tingkat internasional. Dilihat dari tema-tema yang dijadikan perhatian, gerakan-gerakan kalangan muda NU terasa lebih progresif dibandingkan gerakan pemuda organisasi modernis, seperti Muhammadiyah atau Dewan Dakwah Islamiyah (DDI).

Meskipun gerakan mereka ini dapat menjanjikan perubahan, jangkauannya masih sangat terbatas. Kebanyakan gerakan seperti ini berlokasi di kota-kota besar dan hanya menjangkau kader-kader dengan kualifikasi pendidikan yang baik. Padahal sebagian besar warga NU berada di luar lingkaran ini. Untuk itu, dalam jangka waktu dekat, gerakan progresif ini belum bisa menentukan gerak langkah NU secara keseluruhan. Namun demikian, dalam jangka waktu panjang mereka dapat diharapkan menjadi motor bagi transformasi NU secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan organisasi ini adalah suasana kondusif, baik secara internal maupun eksternal, di mana kreativitas dan prestasi personal warganya dapat mendapat tempat serta penghargaan yang layak.

Hodri Ariev

Al-Tafkîr al-Fiqḥiyah 'inda Nahdlatul Ulama

Abstract: *Since its establishment in 1926, Nahdlatul Ulama (NU) has been known as a socio-religious organization that bases its thought and practice on the four outstanding Islamic law schools: Mâlikî, Hanbalî, Shâfi'î and Hânafi. However, during the third NU's Congress in Surabaya, East Java, NU declared itself to be affiliated to Shâfi'ite school only. The Congress was special because this declaration was incorporated formally into its constitution; the Congress also resulted in the creation of a special forum to discuss religious legal problems (bahtsul masail* Ar. bahth al-masâ'il*) faced by the ummah. To date not less than 420 decisions have been produced by this forum that address various problems such as family, politics, economy, education, ritual and so forth.*

Two main characteristics constitute NU's legal tradition. First, NU has a deep commitment to base its practice and thought on the views of the previous ulamâs. *Therefore, on the one hand, NU stands as a guardian of Islamic tradition, but on the other this organization also suffers from the stagnancy in legal creation for quite long. Almost all legal decisions produced by NU are imitations of the previous* ulamâs' *thoughts, especially those discussion by the ulama with Shâfi'ite background. Second, even if there are innovations in legal conclusions, NU tends to apply the methods and approaches already created by* ulamâs *of Shâfi'ite school. This trend is quite new, because applying the same method does not always mean imitation. However, both methods are very much influenced by the worldviews of the previous* ulamâs, *in that NU's legal decisions are taken more on the light of spiritual matters than social interests.*

These two characteristics indicate certain changes within NU's legal creation. Some factors could be listed, but one of the main causes is social transformation arises from the economic development program, within which new religious problems appear as a by-product. Technological innovation has also engendered the questions such as to what extent in-vitro insemination, heart transplant and euthanasia are allowable. Meanwhile, legal decisions of the previous ulamâs *have yet to cover many current social issues such as labor's*

wages, environment problems, human rights and gender issues. These issues in turn encourage NU to investigate other sources of legal creation and the ulamâs *of this organization have to go beyond their traditional legal method i.e. the application of the four outstanding Islamic law schools.*

Another factor to determine NU's view on legal creation lies in the fact that up to 1980s NU religious discourse was dominated mainly by senior ulamâs. *They were very much fiqh-oriented, but had vast religious authority and a great number of followers. As a consequence, various attempts to innovate religious legal creations by* bahtsul masa'il *forum failed. Indeed the people who are involved in the forum generally have a good background in religious as well as in modern education. Unfortunately, they do not hold strong authority as when compared to traditional institutions such as* pesantren *(religious boarding school) and* majelis taklim *(religious study group) that are dominated by senior* ulamâs.

There are, however, significant changes that occurred in the 1980s which have a vast influence over NU's development. The first change occurred with the young generation of NU who launched religious movements with broader orientation, while the latter pertains to the Situbondo, East Java, NU Congress which declared this organization as non-political. The Congress has brought NU back to its root as a socio-religious organization, while at the same time ended its activities on politics. With this shift in momentum, NU could pay more attention to social problems rather than spend its energy on political agendas. In conjunction with this change, NU's legal orientation has also shifted from ritual-oriented to the more social.

The movements initiated by the young generation of NU are progressive in character. Some of them have created non-government organizations to focus on various current issues such as gender equality, reproductive health, democratization, civil society and so forth. Meanwhile, the young generation with strong academic backgrounds prefer to establish study forums. Most of them also engage in current issues and disseminate information on recent findings in religious or social discourses. Seen from the themes to be studied, they appear to be more progressive even when they are compared with the young generations of the so called modernist groups, such as Muhammadiyah or Dewan Dakwah Islamiyah (The Council of Islamic Call).

With the emergence of such movements, NU has shown its internal dynamism. As a matter of fact, progressive movements have yet penetrated the whole lot of NU's followers; they are still limited in certain circles. But, in time such movements may influence the direction to be taken by this organization in the future, especially with regards to the fact that these movements are pioneered by the young generation.

هودرى آريف

التفكير الفقهي عند نهضة العلماء

مدخل

يمثل الفقه احدى الركائز الأربعة[1] لبناء المجتمع الاسلامي. ونظرا لأنه من الناحية الفقهية لا يخلو العمل فرديا كان أم جماعيا إما أن يكون حقا أم باطلا أو صحيحا أم خطأ أو حلالا أم حراما فلا عجب أن يكون لدور الفقه تلك الأهمية البالغة، الشاملة لمختلفة الجوانب من حياة الامة الإسلامية طوال التاريخ، وذلك مع ما يكتنفه الفقه من موافقات واختلافات.

لقد ظهر ما لا يقل عن ثلاثة عشر مذهبا فى مجال التفكير التشريعي الاسلامي، وكان الدافع لنشوء تلك المذاهب اختلاف الأزمنة والأماكن والأطر الاجتماعية، المنظور إليها على أنها تؤثر فى تقرير الأحكام، بيد أنه نتيجة للانتقاء الطبيعي لم يستبق التاريخ منها إلا المذاهب الخمسة[2] التى تتمتع بالشهرة الواسعة وهي مذهب أبى حنيفة (٨٠-١٥٠هـ/ ٦٩٩-٧٦٧م) ومذهب جعفر الصادق (٨٠-١٤٨هـ/٦٩٩-٧٦٥م)[3] ومذهب

مالك بن أنس (٩٣-١٧٩هـ/ ٧١٢-٧٩٥م ومذهب الشافعي (١٥٠-٢٠٤هـ/ ٧٦٩-٨٢٠م) ومذهب ابن حنبل (١٦٤-٢٤١هـ/ ٧٨٠-٨٥٥م)، بل حدث انتقاء ثقافي واستقطاب جعل مذهبا واحدا منها يسود في منطقة معينة. ولم تكن العوامل الجغرافية وحدها الدافع لهذا الاستقطاب بل كانت التقطيعات الاجتماعية والتنظيمية أيضا قد لعبت فيه دورا أهم. واضرب لذلك خير مثال في إندونيسيا إذ نادت جمعية المحمدية مثلا بالرجوع إلى القرآن والسنة ومع ذلك فهي واقعيا ملتزمة بآراء الشافعية، بينما أكدت نهضة العلماء بالتزامها بالمذاهب السنية الأربعة خلافا للشيعة، إنما واقعيا تلتزم أكثر بالمذهب الشافعي.

وفيما يتعلق بتطور التفكير الفقهي على هذا الغرار باندونيسيا، يكون من المثير ملاحظة التطور الفكري لدى نهضة العلماء التى تنتمى واقعيا إلى المذهب الشافعي كما قلنا إلا أنها قد أظهرت فى الآونة الأخيرة تحولا من استعمال الأسس الفكرية للشافعية إلى ما سواها، وهذا يؤكد أن الفكر الفقهي ليس له من المقاومة ما جعلته يرفض التقدم المستمر علميا وتكنولوجيا واجتماعيا وثقافيا.

وفى هذا الاطار بالذات قدم هذا البحث تمهيدا لمناقشة ما لوحظ من التحول الفكري لدى نهضة العلماء من حيث طبيعته ودوافعه واتجاهه ومنزعه. وتحقيقا لذلك تحاول هذه المقالة أن تلقى نظرة تاريخية على نشأة الجمعية وأسسها التنظيمية[٤] وكذلك الاطلاع على طبيعة التفكير الفقهي لديها من أول النشأة حتى حدوث ذلك التحول الفكري مع ملاحظة الفتاوى الصادرة منها ثم التعرض أخيرا للمنزع الذى تسير عليه.

نظرة تاريخية

إن من المعتقد أن تكوين لجنة الحجاز الذى أسفر عن اجتماع كبار العلماء المنعقد بجاوه الشرقية فى منزل الشيخ عبد الوهاب حسب الله (KH. Wahab Chasbullah) فى ٣١ يناير ١٩٢٦م كان يمثل البذور الأولى لنشأة الجمعية نهضة العلماء، وكثيرا ما ينظر إليه الباحثون على أنه رد فعل العلماء من أهل السنة الذين يحسون بالخطر المهدد لمكانتهم؛ وقد تكون هذه النظرة صحيحة إلى حد ما بيد أنها عاجزة عن تفسير نشأة الجمعية فى تلك السنة بالذات وليس قبلها.[٥]

ويضيف فان برونيسان (Van Bruinessen) (١٩٩٧: ٢٧-٣١) عوامل خارجية هامة تؤثر بصفة مباشرة على إعلان قيام الجمعية، فمنها سقوط الخلافة فى تركيا وقيام كل من الملك فؤاد بمصر والملك عبد العزيز بالحجاز بالمنافسة عليها؛ ومنها نجاح الحركة الوهابية فى السيطرة على مكة المكرمة انتصارا لابن سعود على الشريف حسين؛ وتجدر الاشارة إلى أن الأفكار الوهابية تتعارض فى جوانب كثيرة منها مع علماء السنة بما فى ذلك نهضة العلماء.

ونظرا لأهمية الضمان الذى يجب أن يقدمه ابن سعود المؤيد للوهابية وقد انتصر احدهما للآخر لاحترام المذاهب الفقهية السنية والممارسات الدينية السائدة، ولكي يحظى عناية واهتماما ما يستحقها فما لبث أن أعلنت لجنة الحجاز على أنها قيام نهضة العلماء أي انبعاثهم[٦]، بيد أن قانونها الأساسي لم يتم إقراره إلا فى المؤتمر الثالث للجمعية سنة ١٩٢٨م المنعقد بمدينة سورابايا (Surabaya)، وكان أهم ما ورد فيه (النص فى : Anam, 1985: lampiran I) هو:

البند رقم ٢: وأما الهدف من هذه الجمعية فهو "التمسك باحدى المذاهب للأئمة الأربعة فهو إما بالامام محمد بن ادريس الشافعي، أوالامام مالك بن أنس، أو الامام أبى حنيفة النعمان أو الامام أحمد بن حنبل؛ وكذلك العمل بكل ما يرجع بمصلحة للشريعة الاسلامية"

البند رقم ٣: وتحقيقا لأهدافها تقوم الجمعية بمايلى:

أ- توثيق العلاقة بين العلماء الملتزمين بالمذاهب المذكورة فى البند رقم ٢؛

ب- الاطلاع على الكتب المقرر تدريسها للتحقق مما إذا كانت من الكتب المعتمد عليها عند أهل السنة والجماعة أم أنها من مؤلفات أهل البدع؛

ج- نشر الاسلام بأحسن الوسائل على المذاهب المذكورة فى البند رقم ٢

د- العمل على الإكثار من عدد المدارس الاسلامية

ه- الاهتمام بشئون المساجد والمصليات والمعاهد التراثية وكذلك العناية بالايتام والمستضعفين من الفقراء والمساكين

و- إنشاء مؤسسات من شأنها تقدم الزراعة والتجارة والشركات مالم تتعارض مع الشريعة الاسلامية

ومما ثير الاهتمام وتجدر ملاحظته فى هذه البنود أنه بالاضافة إلى الرغبة فى الدفاع عن موقف أهل السنة فإنها تشير كذلك إلى الأمور الاقتصادية، الأمر الذى يجعل الجمعية مماثلة للمحمدية وشركات اسلام على السواء. علاوة على أن الإعلان عن إنشائها إنما هو تأكيد لموقف المحافظين تجاه المجددين وهو إقرار فى نفس الوقت بصحة الممارسات الدينية واتباع المذاهب التى عليها أهل السنة.

وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والتاريخية التى أجريت على نهضة العلماء أن عددا من التغيرات الهامة فى الحياة السياسية وقد جرى تقسيمها

تقليديا إلى ثلاث فترات: الأولى فترة الغياب عن الحياة السياسية من ١٩٢٦م حتى ١٩٤٥م وهي فترة الاستعمار الهولندي حتى أواخر عهد الاحتلال الياباني.[٧] وكانت فى تلك الفترة مجرد جمعية دينية مستقلة ١٩٢٦-١٩٤٢ ثم انضمت إلى مجلس شورى المسلمين ١٩٤٢-١٩٤٥م؛ وأما الفترة الثانية فهي التورط المباشر فى النشاط السياسي ١٩٤٥-١٩٨٤م، وقد اصطبغت النهضة فى هذه الفترة بالجهاد للدفاع عن استقلال البلاد ١٩٤٥-١٩٤٩م، وصارت احدى عناصر الحزب ماشومي (Masyumi) ١٩٤٩-١٩٥٢م، ثم انسحبت عن الحزب وتصبح حزبا سياسيا مستقلا ١٩٥٢-١٩٧٣م، وصارت بعد ذلك احدى العناصر المشكلة لحزب الاتحاد التنموي (PPP) ١٩٧٣-١٩٨٤م؛ وأما الفترة الثالثة فهي الغياب مرة أخرى عن النشاط السياسي والرجوع إلى العمل كمجرد جمعية دينية، وهي ما تعرف باسم العودة إلى الخطة ١٩٢٦م وذلك ابتداء من ١٩٨٤م وما بعدها.

ولكن، نظرا لأغراض هذا البحث يتم تقسيم تاريخ النهضة إلى مرحلتين: الأولى فترة التقليد القولي ١٩٢٦ حتى الثمانينيات؛ والثانية فترة تحول الاتجاه إلى التقليد المنهجي وهي ما تمتد من الثمانينيات وما بعدها.

التفكير الفقهي

ولإدراك حقيقة الاتجاه الفكري الذى يتحول إليه فقه النهضة فإن من الأهمية دراسة الفتاوى الصادرة منها ابتداء من الملتقى القومي الأول والمؤتمر الأول المنعقد بسورابايا فى ١٩٢٦م حتى المؤتمر الأخير المنعقد بشيباسونج (Cipasung) ١٩٩٤م والملتقى القومي المنعقد بلومبوك (Lombok) ١٩٩٧م. فقد

لوحظ على امتداد هذه الفترات حدوث تغير فى الاتجاه وهو التحول من التقليد القولي إلى التقليد المنهجي؛ فالفترة الأولى تمتد من ١٩٢٦ حتى أوائل الثمانينيات، بينما بدأت الفترة الثانية من أوائل الثمانينيات حتى الآن.

وقد صدت عن النهضة طوال هذه الفترات عدد ٤٢٠ فتوى، وذلك من خلال مجلس بحث المسائل (Bahtsul-Masail) المعقود كلما انعقد مؤتمر أو ملتقى قومي، وتتراوح تلك الفتاوى بين المسائل الكلامية وعددها ٥٠ فتوى والعبادات ٢٠٢ فتوى والمعاملات ٩٣ والمناكحة ٥١ والمواريث ٤ فتاوى والسياسة ٢٠، وتم إصدار هذه الفتاوى اعتمادا على الكتب القديمة البالغ عددها ١٦٢ كتابا.

التقليد القولي

والمراد بالتقليد القولي هنا هو اتباع رأي أو قول أو قرار توصل إليه مذهب معين بناء على استنباط الأحكام أو الاجتهاد بتطبيق منهج معين كذلك (انظر: KH. A. Muchith Muzadi, 1995: 62) وهذا يختلف تماما عن التقليد المنهجي.

والأساس الذى ينبنى عليه التقليد القولي كان مقررا فى المؤتمر الأول المنعقد بسورابايا فى ١٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ الموافق ٢١ أكتوبر ١٩٢٦م وينص على "أنه يجب على الامة الاسلامية الآن أن يتبعوا احدى المذاهب المشهورة التى تم تدوينها وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي؛ والعبرة فى ذلك ما ورد فى كتاب الميزان للشعران والفتاوى الكبرى ونهاية السول؛ ففى الميزان للشعرانى ما نصه: كان سيدى على الخواص رحمه الله إذا سأل انسان عن التقليد بمذهب معين الآن هل هو واجب أم لا؟ يقول

وبينما سار الأمر على هذا المنهوال ظهرت فى الوقت نفسه أزمة قيادية أسفر عنها الصراع بين الجناحين، أحدهم كان يعرف باسم الجناح السياسي بقيادة الشيخ إدهام خالد (Idham Chalid) ووراءه أنصاره، وثانيهما يعرف باسم نهضة الخطة بقيادة الشيخ أسعد (As'ad)، واستمر الصراع إلى أن أقبلت الجمعية على عقد المؤتمر بسيتوبوندو (Situbondo) سنة ١٩٨٤م، وكان ذلك مدعاة لنشوء مخاوف خاصة لدى جماعة الشبان فحاولوا الحد من حدة الصراع بالتقريب بين الجناحين ويقوموا فى الوقت ذاته بترويج أفكارهم التجديدية.[١١]

ويرى فان برونيسان (Fealy, 1997: 155) أن أولئك الشبان اتفقوا على أن عقودا ثلاثة مضت من النشاط السياسي قد أهملت فيها نهضة العلماء رسالتها الاجتماعية والاقتصادية والدينية، فالشعارات السياسية الرنانة والمثيرة للعواطف قد جنبتها عن الجهود البناءة؛ وفعلا حقق لهم الملتقى القومى المنعقد بسيتوبوندو ما يصبون إليه إذا جاء فى قراره التأكيد على أنه وإن كانت الممارسة السياسية من حق كل فرد من الشعب بما فى ذلك أعضاء نهضة العلماء إلا أن الجمعية ليست وسيلة لإشباع الأطماع السياسية؛ (انظر: Irsyam, 1984: 151). ولقد أسهمت هذه الملاحظة فى التأثير على المؤتمر لسنة ١٩٨٤م بسيتوبوندو حيث قرر العودة إلى خطة ١٩٢٦م والتخلى عن النشاط السياسي (أي الانسحاب من عضوية حزب الاتحاد التنموي (PPP))، كما توصل المؤتمر إلى التوصية بقبول الأطروحة التى تقدم بها الشيخ مصطفى بسرى كمنهج يسير عليه مجلس بحث المسائل.[١٢]

لم يكن جماعة الشبان يرضون بما عليه كبار الشيوخ من تقصير فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، بل كانوا فى نظرهم يحاولون تجنبه.[١٣] ومن هنا

كانت مطالبتهم بإعمال الفكر والنقد على الآراء الواردة فى الكتب القديمة التى أخذها الشيوخ دون تفسير أو تحفظ، وهذا بالاضافة إلى معارضتهم للتقليد القولي المعمول به. وفى الحقيقة هناك كثير من الشيوخ لم يعجبهم هذه المطالبات بيد أن غير قليل منهم كانوا مصدر إلهام لهم، وذلكم من أمثال الشيخ سهل محفوظ والشيخ محيط مزدى والشيخ عمران حمزة والشيخ الشاب مصطفى بسرى.

إن التأكيد على هذا الاتجاه التجديدي والتحول الفكري لنهضة العلماء كما ورد فى قرار المؤتمر بسيتوبوندو لسنة ١٩٨٤م كان نتيجة للمناقشات الجارية فى الحلقات العلمية المعقودة بمجلس إدارة النهضة فرع جاوه الشرقية منذ سنة ١٩٨٧م سيرا على منوال الفرع بجاوه الوسطى واشترك فى هذه المناقشات من شبان نهضة العلماء خريجى المعاهد العليا. وتم تنظيم هذه المناقشات منذ ١٩٨٤م فى P3M (منظمة غير حكومية) بالاشتراك مع رابطة المعاهد الاسلامية (RMI)؛ وأما نتائجها فتصدرها حولية Pesantren التابعة لـP3M.

ومن خلال الحلقات العلمية المعقودة بدينانيار جومبانج (Denanyar Jombang) بالتعاون بين رابطة المعاهد وP3M تمت صياغة نظام التمذهب الذى يعد أحسن وسيلة لفهم الشريعة الاسلامية المبنية على القرآن والسنة وتطبيقها. ويقضى هذا النظام على أن التمذهب نوعان: قولي ومنهجي، وإذا كان الأول يعنى بنتائج الاجتهاد فإن الثانى يمثل عملية استنباط الأحكام؛ ولذلك فالتمذهب يتم بأحد الأمرين:[١٤] أولهما، للعوام إذ لا سبيل لهم إلا التقليد القولي، وثانيهما التقليد المنهجي وهو للمؤهلين علميا للاجتهاد إلا أهم لم يبلغوا مستوى المجتهد المستقل.

على أن الشيخ مزدى (1995: 62) يصرح بأن التقليد المنهجي[15] لن يصلح إلا لمن يتوفر فيه الشروط للقيام باستنباط الأحكام[16] وإن لم يصل إلى مرتبة المجتهد المطلق المستقل، ولذلك فلا بد من إجراء الاستنباط جماعيا؛ وأما فيما يتعلق بالتقليد القولي فإنه ينبغي للمرء أن يتحقق من الأدلة التي يستند إليها صاحب الفتوى.

ومن بين الأمثلة التي تدل على هذا التحول ما ورد في قرارات اللجنة الدينية للمؤتمر التاسع والعشرين المنعقد بشيباسونج (Cipasung) في الفترة من ٢٧ جمادى الآخر حتى ٢ رجب ١٤١٥هـ الموافق ١ - ٥ ديسمبر ١٩٩٤م حول هذه القضايا وهي أسس المنواطنة والمصالح العامة والبيئة؛ ثم في قرارات اللجنة الدينية للملتقى القومي المنعقد بلومبوك (Lombok) في الفترة من ١٦-٢٠ رجب ١٤١٨هـ الموافق ١٧-٢١ نوفمبر ١٩٩٧م حول نظام الحكم والديموقراطية وحقوق الانسان ومكانة المرأة في الاسلام، وبجانب هذه المسائل الموضوعية فقد جرى أيضا بحث المسائل الواقعية التي يمكن أن يتم معالجتها بمنهج الإلحاق، أعني إلحاقها بالمسائل المشابهة الوارد حكمها في الكتب القديمة المعتمد عليها.

إن المنهج المتبع في معالجة المسائل الواقعية من خلال المجلسين المعقودين أخيرا قد بدأ يظهر فيهما نزعة فكرية معاصرة وتطبيق منهج الإلحاق بشيء من النقد البناء[17] لما في الكتب القديمة من آراء وأقوال أو تطبيق المنهج الذي سار عليه السلف على القضايا الجديدة أو المشابهة. وأما فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية فإن المجلس يأتي أولا بخبير في مجال الموضوع قيد البحث ثم القيام بالتحليل بالرجوع إلى القرآن والسنة مستخدما في

ذلك منهجا[18] معينا لم نعهد به عند الشافعية ويعد جديدا فى تفكير نهضة العلماء.

ولا يعنى هذا النزوع إلى التقليد المنهجي ترك التقليد القولي، فالعلماء ما فتئوا ينبهون على أهمية التراث العلمي القديم إلا أنهم يحاولون استيعاب الآراء القديمة ونقدها من وجهة نظر التفكير المعاصر؛ وفى المسائل الجديدة فقط التى لم يتعرض لها السلف يتم اللجوء إلى الاستنباط الجماعي. وهكذا كانت الاستمرارية بين الموقف التقليدي وبين الأسس الفكرية الجديدة مع اتخاذ السند سلسلة الوسائط معمولا بها دون تعارض بينهما وهو نزعة إصلاحية فى نفس الوقت قائمة كما يقول نور خالص ماجد على الاستيعاب والنقد البناء. (انظر: Rahman: 1997: 136-237).

نزعة جديدة

يرى جلاسنر (Glasner, 1992: 39) أن العلمانية كمفهوم ثقافي فكري تظهر عندما لم يعد الدين قابلا للتطبيق من الناحية الاجتماعية إذ تحل محله مجموعة من الأفكار والعبادات والشعارات الأخرى[19]. وهذا كثيرا ما يحدث نتيجة عجز الفكر الديني عن مواكبة الاتجاهات الفكرية والثقافية وعدم كفاءة التفكير الديني لبيان القيم التى جاء بها الدين بلغة مفهومة.

ومن هنا يكون للتحول الفكري فى الموقف الفقهي لنهضة العلماء أهميتها القصوى حيث يتم به التوسط بين التراث العلمي القديم واجتهاد السلف وبين التوجهات الفكرية المعاصرة، وبالتالى فإن كثيرا من القضايا المعاصرة التى لم يكن من الإمكان معالجتها أصبحت فى متناول الفقه بمنهج فكري معاصر. وفى وسعنا مشاهدة هذا التطور فى قرارات المؤتمر التاسع

والعشرين كما أشرنا المنعقد بشيباسونج (Cipasung) والملتقى القومي المنعقد بلومبوك (Lombok) وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية.[٢٠] فقد جرى في هذين الملتقيين تحديد في المنهج من الظاهر أنه لسلسلة من النتائج التي اسفرت عنها الحلقات العلمية المتجهة إلى التقليد المنهجي بصورة أكثر رسوخا. ومن بين السمات التي يتمتع بها هذا الاتجاه هو النقد البناء والاستيعاب ثم الاعتبار فالقيام باستنباط الأحكام دون الاضطرار إلى أن تكون النتيجة هي نفس النتيجة التي توصل إليها السلف وإن كان الانطلاق من الأساس المشترك، وذلك بصفة أخص فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية.

لقد تم تصنيف المسائل الدينية إلى المسائل الواقعية والمسائل الموضوعية؛ فمعالجة المسائل الواقعية تسير على نفس المنوال القديم[٢١] مع التحقيق والنقد البناء على الأدلة والمناهج التي استخدمها السلف من خلال الرجوع إلى مؤلفاتهم. وأما معالجة المسائل الموضوعية فتتم بالتعرف والتحقق على الموضوع قيد البحث والقيام بتحليلها على الطريقة الأصولية المعمول بها لدى المذاهب الفقهية المعتمد عليها لدى نهضة العلماء وتم استيعابها بمنهج نقدي أيضا ثم التوصل أخيرا إلى حكم الدين في ذلك بناء على نصوص القرآن والسنة. ويمكن أن يكون موضوع "مكانة المرأة في الاسلام" خير مثال على ذلك إذ جاء في قرار الملتقى القومي المنعقد بلومبوك ذى الرقم: 004/Munas/11/1997 أنه :

"استنادا للحديث النبوي الشريف : الجنة تحت أقدام الأمهات؛ وأخرج البخاري ومسلم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك (الحديث)؛ فالاسلام يرفع من

مكانة المرأة بل يلزم من كونها أما أن تستحق كل احترام يفوق احترام الأبناء لأبيهم ثلاث مرات، فيرى نهضة العلماء أن هناك فرصا متكافئة بين الرجل والمرأة للعمل على خدمة الدين والبلد والشعب والدولة بما في ذلك الأعمال العامة. وإذا ما ظهر أن المرأة قد عوملت على أن دورها ثانوي وأصبحت الفرص لها غير متكافئة حتى صار لها دور محدود داخل البيت فمرجع ذلك كما يرى نهضة العلماء هو التأثير الاجتماعي والثقافي على المفاهيم الدينية وليس من الدين.[٢٢] ويقدم نهضة العلماء بين يدي القرار الأدلة من القرآن قوله تعالى ((من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)) سورة غافر: ٤٠، وقوله تعالى ((فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)) سورة آل عمران: ١٩٥؛ وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة)) سورة النحل: ٩٧؛ وقوله تعالى ((إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)) سورة الأحزاب: ٣٥؛ وقوله تعالى ((والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) سورة التوبة؛ ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال (رواه أحمد وأبو داود والترمذى؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : الناس سواسية كأسنان المشط (الحديث).

على أن هناك وظائف خاصة لن يقوم بها إلا المرأة من حيث طبيعتها الخلقية كالحمل والرضاعة ووظائف أخرى فى الأسرة لا يمكن أن يقوم بها الرجل؛ والحال كذلك مع الرجل إذ يجب عليه الانفاق فيلزم له الكسب حيث لا يجوز أن تقوم به المرأة؛ إلى غير ذلك من الوظائف الخاصة لكل منهما. ثم إنه تعالى يقول ((يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)) سورة الشورى: ٤٩، اهـ.

ومن الملاحظ فى معالجة المسائل الموضوعية وجود اهتمام بالجوانب الاجتماعية التى هي فى الحقيقة سمة الحنفية؛ وقد اصبح هذا الاهتمام يمثل الخط الرئيسي للفكر النهضوي عموما بما فى ذلك بالطبع التفكير الفقهي. وباختصار، لقد حدث تطور فكري لدى فقهاء نهضة العلماء يتجه إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية مواكبين فى ذلك التطور الفكري الطارئ على الأفكار المنتشرة لدى الآخرين من علماء النهضة وغيرهم حول الجوانب الأخرى كالجانب العقدي أعنى إعادة التفكير فى الأسس العقدية لأهل السنة والجماعة والتصوف أيضا.

ومن أبرز الشيوخ الذين أسهموا بأفكارهم فى تجديد منهج التفكير الفقهي لنهضة العلماء هم الشيخ سهل محفوظ والشيخ على اليافعي والشيخ مصطفى بسرى والشيخ محيط مزدى والشيخ واحد زينى ومصدر فريد مسعودى[٢٣]. ولم تكن هذه الحركة التجديدية داخل نهضة العلماء بخالية من العوائق لأن كثيرا من كبار الشيوخ كان لهم الحساسية ضدها وإن وجد فيما بينهم من يتمتع بالتقدمية، وليس أدل على ذلك مما حدث للشيخ سهل محفوظ إذ ما ان مهد الطريق لتطبيق مبدإ المصلحة فى معالجة المشاكل الاجتماعية حتى اتهم بالنزوع إلى اتباع الطوفى[٢٤] الفقيه الشيعى عقيدة

والحنفي مذهبا. بيد أن الشيخ على اليافعي لم يتعرض لمثل هذا الاتهام عندما اتجه إلى نفس المنزع[٢٥]؛ وأما الشيخ سهل محفوظ فما لبث أن تعرض -كما يقول ناشر كتابه مناهل الفقه الاجتماعي- للاتهام باتباع منهج الشاطبي[٢٦] بعد أن تخلص من الاتهام باتباع الطوفي، وإن كان الأمر في ذلك حقيقة ليس إلا محاولة لإعادة فهم الشافعي بصورة أكثر معاصرة.[٢٧] مع أنه كما يرى سهل محفوظ فإن مبدأ المصلحة قد استخدمه الامام الغزالي المتوفى ١١١١م أي ما يسبق عصر الشاطبي بمائتين وخمسين سنة. وللمقارنة نقدم فيما يلي نص للغزالي والشاطبي:

"المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة، ليس هذا مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وكل ما يتضمن حفظ هذه الخوال الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة" اهـ. (المستصفى من على الأصول، المجلد الأول، ص: ٢٨٤-٢٨٧)

".. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمسة وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل عملت ملء منها الشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد"اهـ. (الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، المجلد الأول، ص. ٣٨)

والحقيقة أن المنهج الذى طبقه كل من الشيخ سهل محفوظ والشيخ علي اليافعي قريب جدا من منهج الغزالى والشاطبي إلا أنه يمثل من الناحية النظرية توسعا وتطويرا للفكر الغزالى لأن منهج الشاطبي ما هو إلا تطبيق للمنهج الغزالي مع التركيز على الجانب الاجتماعي الذى هو سمة الحنفية. وأما المنزع الحنفي البارز فى هذا التحول الفكري لفقه نهضة العلماء فإننا وجدناه فى الاتجاه إلى التركيز على الجانب الاجتماعي وهو ما دعا إليه الشبان منذ قيام حركتهم التجديدية. وإذا كان المنهج الذى قدمه كل من الشيخ سهل محفوظ والشيخ علي اليافعى مبنيا على المنهج التركيبي فإن المنهج الذى طرحه مصدر مسعودى تلفيقي فى طبيعته. وهذا ظاهر فى اتجاهه الفكري إلى إعادة تعريف مفهومي القطعي والظني، إذ يرى أن القطعي هو المصلحة أو العدالة التى تمثل روح الأحكام نفسها، بينما يمثل مفهوم الظني الحكم عينه أو النص الذى يراد منه محاولة تطبيق ما يقتضيه القطعي فى الحياة العملية[٢٨]، وهو يصرح فى ذلك بإيراد عبارة للشافعي مع التعديل إذ يقول "إذا صح المصلحة فهو مذهبى" وذلك كما كان الشافعي يقول "إذا صح الحديث فهو مذهبي".[٢٩]

إن لهذه المناهج الثلاثة التى طبقها بشكل مختلف كل هؤلاء الشخصيات الثلاث أهمتيها الخاصة فى تجديد الفكر الفقهي لدى نهضة العلماء وخاصة على الجيل الشاب من خريجى المعاهد التراثية، والاختلاف بينها لا يمثل إلا عنصر التكامل بينها، وإن كان مسعودى يعترف (Baso فى Rahman, Ed. 1997: 408-409) بأن الأمر كله لم يزل فى بداية لعملية لم يتم صياغتها بحيث تنساق فى بناء نظري متكامل، والمهم أنه يجرى الآن على قدم وساق

بناء منظور فقهي قائم على الاهتمام بالجانب الاجتماعي وقابل للتطبيق فى معالجة المشاكل المعاصرة.

خاتمة

كانت التفكير الفقهي لنهضة العلماء فى الفترة ما بين العشرينيات حتى الثمانينيات يقوم على إلحاق المسائل المعاصرة للفتاوى القديمة تطبيقا لمنهج التقليد القولي الذى اعتبره الفقهاء المجددون بأنه منزع رجعي لا يميل إلى الابداع، ولا يهتم بالاعتبارات التاريخية والاجتماعية بل يؤدى إلى الجمود الفكري فلا يستطيع مواكبة أي تطور. ولذلك فابتداء من أوائل الثمانينيات ظهر اتجاه إلى التجديد فى صورة التقليد المنهجي وهو اتجاه اتباع المذاهب من حيث مناهجها، وبذلك تحاول نهضة العلماء أن يقيم بناء فقهيا قائما على الاهتمام بالجانب الاجتماعي وقابل للتطبيق فى معالجة المشاكل المعاصرة، وهو محافظة فى نفس الوقت على استمرارية مسيرة أهل السنة من خلال قيام التجديد على خطوط الفكر القديم.

ويتسم التجديد لدى نهضة العلماء فى هذا الصدد بالمنهج التركيبي وتخطى الحدود المذهبية من أجل بناء منظور فقهي ذى اهتمام بالجوانب الاجتماعية. وفى هذا الإطار يتم التركيب بين المنهج الشافعي والمنهج الحنفي مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأمور التعبدية المحضة وغيرها من الأمور الاجتماعية. غير أن من المعترف به أن هذه العملية مازالت فى بدايتها و لم يتم صياغتها بحيث تشكل فناء نظريا متكاملا فى الفقه.

وإلى هنا انتهينا من هذا البحث الذى نقدمه كتمهيد لإجراء مناقشة حول تطور التكفير الفقهي لدى نهضة العلماء. وإذا كان هناك تقصير لا

ينبغى حدوثه أو إطالة ليس من الضروري وقوعها فليعلم أنه قصور فى الكاتب. وأدين بالفضل إلى زملائى فى Lakpesdam وسكرتارية الادارة العامة لنهضة العلماء وخاصة خدمة المكتبة، أتضرع إلى الله أن يجعلها لهم عملا صالحا، وشكرا.

قائمة المراجع

Hasil Halaqah Denanyar tentang Sistem Bermadzhab,

(نتائج الحلقات العلمية بدينانيار حول نظام التمذهب، عقدها معهد منبع المعارف بالتعاون مع مركز رابطة المعاهد الاسلامية فى ٢٨ يناير ١٩٩٠م)

Hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama, Cipasung 1-5 Desember 1994. Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr PBNU.

(قرارات المؤتمر التاسع والعشرين لنهضة العلماء، المنعقد بشيباسونج ١-٥ ديسمبر ١٩٩٤م، جاكرتا: لجنة التأليف والنشر بمجلس إدارة نهضة العلماء.)

Hasil-hasil Musyawarah nasional Alim Ulama & Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama, Lombok 17-21 Nopember 1997, Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr.

(قرارات الملتقى القومي للمشاورة بين العلماء والمؤتمر الكبير لنهضة العلماء. لومبوك ١٧-٢١ نوفمبر ١٩٩٧م؛ جاكرتا: الامانة العامة لمجلس إدارة نهضة العلماء ولجنة التأليف والنشر.)

Masyhuri, KH. Abdul Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: RMI dan Dinamika Press.

(المسائل الدينية فى قرارات المؤتمر والملتقى القومي لنهضة العلماء. سورابايا.)

Anam, Choirul, 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu.

خير الأنام: نشأة نهضة العلماء وتطورها.

Baso, Ahmad. 1997. *Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqh NU*, dalam *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 tahun KH. Ali Yafie*, Jamal D. Rahman (Ed. *At all*) halaman 131-143 dan 407-415. Bandung: Mizan.

(الوقوف إزاء التحديات الدينية: موقف جديد للتفكير الفقهي لنهضة العلماء، فى : الفكر الجديد للفقه الاجتماعي: سبعون سنة على ميلاد الشيخ على يافعي.)

Bruinessen, Martin van. 1997. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet. Kedua, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dari manuskrip *Traditionalist Muslims ini A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict and The Search for A New Discourse*. Yogyakarta: *LKiS*.

(نهضة العلماء: التقاليد والعلاقات السلطانية والبحث عن التفكير الجديد. ترجمة فريد وجدى للمخطوطة): *Traditionalist Muslims ini A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict and The Search for A New Discourse*

----------. 1997. *Tradisi Menyongsong Masa Depan: Rekonstruksi Wacana Tradisionalis dalam NU*, dalam *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama - Negara*, Greg Fealy dan Greg Barton (Ed.), halaman 138-161, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah *LKiS* dari *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia* (1996). Yogyakarta: *LKiS*.

(الموقف التقليدي إزاء المستقبل: إعادة بناء الدراسات السنية في نهضة العلماء؛ فى "أصولية أهل السنة: العلاقة السياسية بين نهضة العلماء والدولة. لجنة الترجمة لكتاب *Traditional Islam and Modernity in Indonesia* ١٩٩٦)

Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 6 1997. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

(دائرة معارف الفقه الاسلامي)

Fealy, Greg dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah *LKiS* dari *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia* (1996). Yogyakarta: *LKiS*.

(العلاقة السياسية بين نهضة العلماء والدولة. لجنة الترجمة لكتاب *Traditional Islam and Modernity in Indonesia* ١٩٩٦)

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. Tt. *Al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, jilid 2

المستصفى من علم الأصول للغزالى

Glasner, Peter E. 1992. *Sosiologi Sekularisasi: Suatu Kritik Konsep*, diterjemahkan oleh M. Mochtar Zoerni dari *The Sociology of Secularization a Crtique of a Conscept*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

(العلمانية من ناحية علم الاجتماع: دراسة نقدية للمفاهيم)

Irsyam, Mahrus. 1984. *Ulama dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.

(العلماء (الفقهاء) والأحزاب السياسية)

Mahfudh, KH. MA. Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: *LKiS*.

(مناهل الفقه الاجتماعي)

Mas'udi, Masdar Arid. 1995. *Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah*, dalam Ulumul Qur'an No. 3, Volume VI, tahun 1995. Jakarta.

(الرجوع إلى قاعدة المصلحة للتشريع الاسلامي)

----------. 1993. *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus.

(الدين والعدالة)

Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Madzhab*, cet. Kedua, diterjemahkan oleh Masykur A.B. dkk. Dari *Al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Khamsah*, Jakarta: PT. Lentera Basirtama.

الفقه على المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية

Muzadi, KH. A. Muchith. 1995. *NU dan Fiqh Kontekstual*, cet. II, Yogyakarta: LKPSM NU DIY.

(نهضة العلماء والفقه المعاصر)

Al-Syathibi, Abu Ishaq. Tt. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid I, Dar al-Fikr al-'Arabi.

الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبي

Yafie, KH. Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah*. Bandung: Mizan.

(نحو فقه اجتماعي: من مشاكل البيئة والضمان الاجتماعي حتى مفهوم الأخوة الاسلامية)

الهوامش

١. وهذه الركائز هي الفقه وعلم الكلام والفلسفة والتصوف؛ لكل منها أثره - مع اختلاف من حيث الكثافة - في بناء التركيبة الاجتماعية للامة طوال تاريخها

٢. محمد جواد مغنية: المذاهب الفقهية الخمسة (Fiqh Lima Mazhab)، جاكرتا: Lentera Basirtama، ١٩٩٦م.

٣. المذهب الجعفري يلتزم به أتباع الشيعة وغير معروف لدى العالم السني وخصوص في اندونيسيا.

٤. والمراد بالأسس التنظيمية هنا هو المبادئ التي ينبني عليها التفكير الديني لديها وخاصة في مجال الفقه.

٥. كان في وسع كل من المحافظين والمجددين أن يعقدوا صلحا وتعاونا بينهما من خلال جمعيتي شركات اسلام والمحمدية، وإن الأولون يبدون في كثير من الأحيان معارضة للنقد اللاذع الذي يتعرضون له من جانب المجددين إزاء قضايا زيارة القبور وعقد حلقات الذكر والتمذهب وما إليها. وقد ظهر الخلاف بينهما عندما رغب المجددون عن حمل مطالب المحافظين إلى مؤتمر الخلافة بمكة معهم وعرضها على ابن سعود للحصول على ضمان منه لاحترام المذاهب الفقهية السنية وترك المحافظين ما هم عليه من ممارسات دينية كانت مدعاة للاتهام بممارسة البدع والخلافات أو الضلال. وكان الدافع الكامن وراء هذه المطالب ما شاهدوا في نزعة الوهابية الأصولية المتجهة إلى تحريم زيارة الأضرحة أو التضرع إلى الأموات وكذلك الممارسات الدينية الشعبية المعهودة (Bruinessen, 1997: 32)؛ وانظر أيضا في : (Fealy, 1997) التمهيد ص. xxiii-xx

٦. كان الشيخ محمد هاشم اشعري (KH. Hasyim Asy'ari) يرى سنة ١٩٢٤م أنه لم يأت الأوان لإنشاء جمعية توحد صفوف العلماء أصحاب المعاهد التراثية؛ ولكن بناء على إلحاح الشيخ عبد الوهاب حسب الله وافق سنة ١٩٢٦م إنشاء الجمعية كوسيلة مشتركة لحركة العلماء التراثيين؛ بل تفضل بتأليف رسلة صغيرة باللغة العربية أصبحت فيما بعد معروفة باسم مقدمة القانون الأساسي لجمعية نهضة العلماء، (Bruinessen, 1997: 37)

٧. لا يعد تورط النهضة في حركة المقاومة ضد الاستعمار والاحتلال سواء بشكل مباشر أم بشكل دبلوماسي نشاطا سياسيا، لأن الاهتمام فيها كان منصبا على تحرير البلاد من قبضة الاستعمار.

٨. المسائل الدينية: قرارات الملتقى القومي والمؤتمر لنهضة العلماء، رتبها الشيخ عبد العزيز مشهوري؛ مجلس ادارة المعاهد الاسلامية، سورابايا: Dinamika Press؛ ص. ٢-٣

٩. غير أنه لما كانت النتيجة المتوصل إليها غير مرضية فقد ظهرت قضية مماثلة تطفو على السطح في الملتقى القومي للعلماء المنعقد بمدينة يوغياكرتا (Yogyakarta) في ٣٠ شوال ١٤٠١هـ الموافق ٣٠ أغسطس ١٩٨١م وقد اتسعت لتشمل قضايا طفل الأنابيب وازدراع العيون وبنك العيون وازدراع الكلى والقلب.

١٠. والحق أن الكتب التي يقرون بأنها من الكتب المعتمد عليها لم تزل موضع نظر، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة مؤلفيها ومناهجها الاستنباطية ومدى صحة الأحكام فيها؛ وقد بدأ التشكك في كفاءة المؤلفين يظهر في الآونة الأخيرة (الفترة الثانية) إذ عرض على الملتقى القومي المنعقد بقرية سيتوبوندو (Situbondo)

١١. ومن بين أولئك الشبان هم عبد الرحمن واحد (Abdurrahman Wahid) وفهمي سيف الدين (Fahmi Saifuddin) ومصطفى بسري (Musthafa Bisri) ومحمد طاهر (Muhammad Thohir) ومحمد زمراني (M. Zamroni) والشيخ سهل محفوظ (Kiyai Sahal Mahfudh) ومحيط مزدي (Muchit Muzadi)؛ انظر: (Fealy, 1997: 155) على الهامش.

١٢. والمنهج الذي كان يقترح به الشيخ مصطفى بسري وقد سار عليه في الحقيقة مجلس بحث المسائل التابع لإدارة فرع الجمعية بمحافظة جاوه الوسطى منذ ١٩٧٩م حتى انعقاد المؤتمر لسنة ١٩٨٤م قائم على استيعاب الكتب القديمة بنظرة نقدية من وجهة نظر المعاصرة على ضوء القرآن والسنة والقيام ببيان المنهج الذي كان السلف يسير عليه، حتى إذا ما طرأت قضايا جديدة لم تحدث من قبل أو لم يتعرض لها السلف أو مهما لم تصلح كفاءة أعضاء المجلس لاستيعاب الموضوع المطروح يرى مصطفى بسري ضرورة الإتيان بخبير فيه أو صاحب القضية. وقد طبق هذا المنهج بمجلس بحث المسائل لفرع نهضة العلماء بجاوه الشرقية حيث أتى بجانب الطبيب الشخص الذي أجري له عملية تبديل الجنس.

١٣. ومن بين المواقف التي يشكون منها أن الشيوخ يرفعون أصواتهم عندما يقومون بالأمر بالمعروف ولكن في حالة النهي عن المنكر فإن موقفهم يبدو عليه التحفظات بل يميلون إلى السكوت. ويظهر هذا جليا ريثما يتحتم عليهم المواجهة مع المصالح الحكومية. وخير مثال على ذلك موقفهم إخيرا من جماعة دار الارقم وإبطال الأوراق اليانصيب لا لأنه حرام إنما كان نتيجة لمظاهرات الشبابية، بل حدث أن سحب مجلس العلماء فتوى بالتحريم نتيجة تحذير من الحكومة. وعندما أعلن الشيخ إبراهيم حسين قوله في أن الأوراق اليانصيب ليس من نوع الميسر وعارضه مجلس العلماء بجاوه الغربية إذ أصدر فتوى بتحريمه لم تملك جمعية واحدة من الجمعيات الاسلامية الكبرى الشجاعة للتأييد خوفا من الوقوع في مواجهة مع الحكومة؛ لمزيد من المعلومات انظر: (Bruinessen, 1997: 211)

١٤. انظر: تقرير عن نتائج الحلقات المعقودة بديناناير حول نظام التمذهب فى ٢٨ يناير ١٩٨٠م.

١٥. ويراد بالتقليد المنهجي هنا اتباع المذاهب المعتبرة فى مناهجها الفكرية وتطبيقها من خلال الاجتهاد الجماعي.

١٦. ليس هناك معلومات متوفرة حول الشروط اللازم استيفاؤها للاستنباط وبالتالى فلا نستطيع أن نتصور إلى أي مستوى تصل إليه الكفاءة العلمية حتى يتأهل المرء للقيام بالاستنباط أو المشاركة فيه. غير أنه تقرر أخيرا أن الاستنباط يتم جماعيا حتى يستفيد الواحد من الآخر ويكمل الثانى الشرط الذي لم يتوفر لصاحبه.

١٧. والمراد بالنقد البناء فى هذا الصدد هو القيام بدراسة آراء السلف للاعتبار وليس لأخذها كأحكام لازمة لا ترد، وبهذا فنتيجة الاستنباط ليست بالضرورة موافقة لما كان عليه السلف وإن كانت قائمة عليها.

١٨. ونلاحظ أن فى الوسائل المنهجية لاستنباط الأحكام نزعة إلى تبديل الأسس الشافعية بالأسس الحنفية؛ وسنرجع إلى مزيد من التفصيل حول هذا الموضوع فى السطور التالية.

١٩. ويفهم من المصطلح "العلمانية" فى هذا الإطار على أنها مؤشرة لتراجع الالتزام بالأمور الدينية سواء كانت تعبدية أم غيرها وكذلك الأبعاد الأخرى نتيجة الانبثاق العقلاني المحض الخالي من بناء فكري قائم على الأسس الدينية.

٢٠. وتلك المسائل هي : (١) أسس المواطنة، و(٢) المصالح العامة، و(٣) البيئة، و(٤) الديموقراطية، و(٥) حقوق الانسان، و(٦) مكانة المرأة فى الاسلام، و(٧)

٢١. وذلك بقياس المسائل الجديدة على المسائل التى حدثت من قبل وتوصل إلى أحكامها السلف.

٢٢. على أن هناك معلومات مثيرة حول ما كان يجرى فى بحث المسائل المتعلقة بدور المرأة فى الاسلام، فإنه طبقا للدكتور آزيومارديى أزرا (Dr. Azyumardi Azra) ويسلم بها جورج فيلى (Georg Fealy) تفيد أنه ليس جميع المشاركين فى الملتقى القومي متفقين على القرار المشار إليه، فقد بقي المنكرون على نظرتهم التقليدية إلى المرأة إلا أنه نظرا لأن كبار الشيوخ قد أجمعوا عليه فإن هؤلاء المنكرين لم يكن فى وسعهم إلا التسليم كرها. وبعبارة أدق كان اتخاذ القرار حول مكانة المرأة فى الاسلام مصطنعا.

٢٣. بالإضافة إلى أسماء أخرى كان لهم إسهامهم البارز وهم عبد الرحمن واحد وفهمى سيف الدين والدكتور (طبيب) محمد طاهر وآسف هادى براناتا وزمرانى وسعيد بودايرتي ومحبوب جنيدى وطلحة حسن والحاج محمد مناسر وسيف المجاب وعمر با سالم وخنيل مسند وغفار رحمن وعبد الله شروانى وسلامت افندى يوسف ومحمد اخوان شام وموسى عبد الله ومصطفى زهاد

ودانيال تاجونج وأحمد باغيا. لمزيد من التفصيل انظر: Bruinessen, 1997: 133-134 وأيضا: Fealy, 1997: 155.

٢٤. وهو نجم الدين الطوفى (٦٧٥-٧١٦هـ) الشيعي عقديا والحنفي مذهبا؛ وأما آراؤه فى المصلحة فقائمة على الأسس التالية: (١) أن العقل حر تحديد المصالح والمضار فيما يتعلق بالأمور الدنيوية؛ (٢) والمصلحة أصل مستقل بجانب القرآن والسنة؛ (٣) والمجال الذى يطبق فيه مبدأ المصلحة هو الأمور الدنيوية والعرف والعادات؛ (٤) والمصلحة أهم الأصول الشرعية وأقواها. وأما المبدأ الذى لم يوافق عليه فقهاء النهضة قول الطوفي بأنه إذا ما حدث تعارض بين نصوص الوحي والمصلحة فالمقدم فى ذلك هو المصلحة. انظر: Ensiklopedi Hukum Islam vol. 6. 1997. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

٢٥. يطبق اليافعي هذا المنهج فى كثير من المناسبات و لم يلتزم بحذافيره . وبدلا من تطبيقه حرفيا على مسألة واحدة فإنه استخدم منهجا أطلق عليه "الكليات الخمس". وللوقوف على تطبيقات هذا المنهج انظر : Yafie, 1994 وخاصة ص. ٩١، ١٣٣، ١٤٨، ١٤٩، ١٦٩، ١٨٥، ٢٥٩، ٢٧٣، ٢٧٧.

٢٦. وهو أبو اسحق الشاطبي المتوفى ٧٩٠هـ/١٣٨٨م الفقيه الحنفي. ويعد كتابه "الموافقات فى أصول الأحكام" أشهر كتب وأكمله فى أصول الفقه الحنفي.

٢٧. انظر تقرير الناشر: مناهل الفقه الفقه الاجتماعي للشيخ سهل محفوظ، ص . xx

٢٨. مصدر مسعودى، فى علوم القرآن، رقم ٣، ج ٦، سنة ١٩٩٥م، ص. ٩٤-٩٩.

٢٩. المرجع السابق، (١٩٩٣م) خاصة ص. ٤٨-٥٩ و ١٢٦-١٣٥.

هودرى آريف: طالب بالدراسات العليا الجامعة الاسلامية الحكومية شريف هداية الله جاكرتا.

حقوق الطبع محفوظة .

عنوان المراسلات :
STUDIA ISLAMIKA, KAMPUS IAIN JAKARTA
Jl. IR. H. JUANDA NO. 95, PO BOX 225
CIPUTAT 15401, JAKARTA INDONESIA
TELP. (021) 7401616/ 7401925
FAX : (021) 7401592
رقم الحساب : ٠٠٢٧٧٩٣٠٠١ BANK NEGARA INDONESIA
(BNI) 1946 KEBAYORAN BARU / IAIN JAKARTA.
قيمة الاشتراك السنوى فى اندونيسيا :
لسنة واحدة (٤ اعداد) : ٤٠.٠٠٠ روبية (٢٠ دولارا امريكيا)
لسنتين (٨ اعداد) : ٧٠.٠٠٠ روبية (٣٥ دولارا امريكيا)
قيمة العدد الواحد : ١٠.٠٠٠ روبية (٥ دولارات امريكية)
وفى البلدان الاخرى يضاف الى قيمة العدد مبلغ ١٠.٠٠٠روبية (٥ دولارات) للارسال بالبريد الجوى . اما الارسال بوسائل خاصة فيرجى قبل ذلك الاتصال بالمجلة .

للاشتراكات وفى حالة تغيير العناوين يرجى الاتصال كتابيا بقسم التوزيع مجلة ستوديا اسلاميكا.

طباعة :
INIS, JAKARTA, INDONESIA

ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسية للدراسات الإسلامية

السنة التاسع، العدد ١، ١٩٩٩

هيئة الإشراف على التحرير:

هارون ناسوتيون

مسطوحوه

قريش شهاب

عبد العزيز دحلان

محمد ساتريا أفندى

محمد يونان يوسف

مسلم ناسوتيون

قمر الدين هداية

دين شمس الدين

واهب معطى

نبيلة لوبيس

رئيس التحرير:

أزيوماردى أزرا

المحررون:

سيف المزانى

هيندرو براستيو

يوهان هيندريك مولمان

ديدين شفر الدين

على منحنف

سكريتير التحرير:

عارف سبحان

حيني نورنى

تصميم ومراجعة اللغة الإنجليزية:

دونل فوتير

تصميم ومراجعة اللغة العربية:

نورصمد

تصميم الغلاف:

س. برنكا

ستوديا إسلاميكا (ISSN: ٠٢١٥-٤٩٢) مجلة دورية تصدر أربع مرات فى العام عن جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا (STT/DEPPEN NO. ١٢٩/ DITJEN/PPG/STT/١٩٧٦) برعاية وزارة الشئون الدينية بجمهورية إندونيسيا، وتخصص للدراسات الإسلامية فى إندونيسيا، بقصد نشر البحوث والمقالات التى تبحث فى القضايا الأخيرة. وتدعو المجلة العلماء والمثقفين إلى أن يبعثوا إليها بمقالاتهم العلمية التى تتعلق برسالة المجلة. والمقالات المنشورة على صفحات هذه الدورية لا تعبر بالضرورة عن إدارة التحرير أو الهيئات ذات الارتباط، وإنما عن آراء الكتاب.